PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

UNIT KERJA : **DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANISYAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **419187**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.208.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 508.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 147.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, SUZUKI INAZUMA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI DTX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

	13.000.000		
C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**80.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**22.000.000**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**180.462.558**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.637.462.558**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**13.220.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.624.242.558**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.